



PERILAKU KORUPSI: ANTARA KEBIASAAN ATAU HASIL PENDIDIKAN (Sebuah Tinjauan Psikologi)

Budiarda Widya Laksana[✉]

Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Ngawi

Alamat e-mail: barda.wul2@gmail.com

Abstrak

Perilaku korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh struktur hukum dan ekonomi, tetapi juga oleh faktor internal individu, pengaruh eksternal, serta konstruksi budaya yang berkembang dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dari sudut pandang ilmu psikologi apakah perilaku korupsi lebih merupakan hasil dari kebiasaan yang terbentuk dalam lingkungan sosial, atau akibat dari proses pendidikan yang tidak efektif dalam membangun karakter dan integritas. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menelaah berbagai literatur dan studi empiris yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa motivasi berprestasi yang rendah, (faktor internal), tekanan lingkungan serta peluang yang terbuka (faktor eksternal), dan budaya yakni budaya kekeluargaan, budaya bapakisme dan budaya yang kurang asertif, secara sinergis membentuk perilaku korupsi sebagai suatu kebiasaan yang sulit diubah. Pendidikan yang hanya berfokus pada aspek kognitif tanpa penguatan nilai-nilai moral turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, pencegahan korupsi memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup pendidikan karakter, penguatan motivasi berprestasi yang sehat, serta transformasi perubahan pola asuh yang dapat memunculkan anak motivasi berprestasinya

Kata Kunci: Perilaku Korupsi, Hasil Pendidikan

Abstract

Corrupt behavior is a complex phenomenon that is not only influenced by legal and economic structures, but also by internal individual factors, external influences, and cultural constructions that develop in society. This article aims to analyze from the point of view of psychology whether corruption behavior is more the result of habits formed in the social environment, or the result of an ineffective educational process in building character and integrity. Using a descriptive-qualitative approach, this research examines various relevant literature and empirical studies. The results of the study show that low achievement motivation, (internal factors), environmental pressure and open opportunities (external factors), and culture, namely family culture, culture fatherism and a culture that lacks assertiveness, synergistically form corruption behavior as a habit that is difficult to change. Education that only focuses on cognitive aspects without strengthening moral values also exacerbates this condition. Therefore, corruption prevention requires a multidimensional approach that includes character education, strengthening healthy achievement motivation, and transforming parenting changes that can bring up children's achievement motivation.

Keywords: Corruption Behavior, Education Outcomes

PENDAHULUAN

Perilaku korupsi telah menjadi salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, hukum, dan moral masyarakat. Banyak upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya korupsi dengan dibentuknya beberapa lembaga khusus untuk menanganinya seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Widiastuti, 2009). Tidak hanya pemberantasan saja namun banyak juga kajian – kajian yang menganalisa faktor – faktor yang bisa cenderung menguatkan perilaku dan melemahkan perilaku korupsi meskipun keberhasilannya belum seperti yang diharapkan.

Artikel ini mencoba menjelaskan dalam pandangan ilmu Psikologi, bahwa penyebab suatu perilaku adalah interaksi antara beberapa faktor yakni faktor yang ada dalam diri seseorang dan faktor yang berada di luar diri seseorang. Kedua faktor ini juga bersinggungan dengan faktor budaya yang ada pada wilayah tertentu yang cakupannya bisa lebih meluas. Faktor didalam diri bisa diartikan sebagai suatu ciri kepribadian (Mustafa, 2004) . Ciri kepribadian tersebut akan cenderung untuk membuat orang lebih mudah atau tidaknya orang dalam memutuskan perilaku yang akan dilakukannya termasuk perilaku godaan untuk melakukan korupsi. untuk faktor – faktor diluar dirinya adalah kondisi yang terjadi yang memudahkan orang untuk melakukan perilaku korupsi. Teori belajar sosial Bandura menjelaskan bahwa individu cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari lingkungan, khususnya ketika perilaku tersebut tampak menguntungkan dan tidak mendapat sanksi (Bandura, 1977). Dalam banyak konteks, korupsi menjadi “perilaku sosial yang dipelajari” karena dilakukan oleh figur otoritas, dilegalakan secara sosial, dan bahkan dianggap sebagai bagian dari strategi bertahan hidup dalam sistem yang rusak. Pandangan psikologi perkembangan juga menambahkan apabila perilaku moral seseorang sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan dan pengalaman sosial selama masa pertumbuhan. Pendidikan idealnya menjadi wahana pembentukan karakter, bukan sekadar tempat transmisi pengetahuan akademis. Namun, sistem pendidikan yang menekankan pada pencapaian kognitif semata tanpa integrasi nilai moral dan sosial justru menciptakan individu yang cerdas namun tidak memiliki kepekaan etis. Mereka dapat dengan mudah tergelincir dalam perilaku menyimpang salah satunya untuk melakukan perilaku korupsi

Tidak kalah penting adalah faktor budaya yang membentuk pola pikir kolektif. Dalam masyarakat di mana korupsi dianggap sebagai hal yang “lumrah” atau bahkan “dapat dimaklumi”, kebiasaan tersebut dengan mudah diwariskan dan direproduksi antar generasi. Budaya permisif ini menciptakan iklim sosial yang tidak mendukung integritas dan mendorong normalisasi perilaku menyimpang. budaya masyarakat ini berperan dalam membentuk perilaku koruptif. Budaya

kekeluargaan yang sempit, yang menempatkan loyalitas pada kelompok sebagai hal utama, seringkali membenarkan tindakan korupsi selama itu “untuk keluarga” atau “demi kebersamaan”. Budaya bapakisme atau paternalistik menempatkan pemimpin sebagai figur tak tergugat, sehingga praktik korupsi yang dilakukan oleh pemimpin sering kali dianggap wajar. Ditambah dengan lemahnya kemampuan masyarakat untuk berkomunikasi secara asertif, maka kritik dan kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang menjadi sangat terbatas.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika sistem pendidikan pun tidak memiliki daya untuk melawan dominasi budaya permisif tersebut. Kurikulum pendidikan cenderung belum menyentuh aspek karakter secara mendalam. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial hanya menjadi slogan, bukan sesuatu yang benar-benar diinternalisasi melalui pengalaman belajar. Bahkan dalam banyak kasus, lembaga pendidikan justru menjadi ladang subur bagi praktik korupsi kecil-kecilan—seperti manipulasi nilai, suap dalam proses penerimaan, dan ketidakadilan dalam sistem evaluasi.

Maka dari itu, studi ini penting untuk menelaah secara psikologis bagaimana perilaku korupsi terbentuk, serta sejauh mana faktor kebiasaan dan pendidikan memengaruhi pola tersebut. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui telaah literatur dan studi-studi empiris, artikel ini berupaya mengurai keterkaitan antara pembentukan karakter, lingkungan sosial, dan sistem pendidikan dalam membentuk perilaku koruptif. Harapannya, artikel ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap strategi pencegahan korupsi berbasis psikologi pendidikan dan budaya, dengan menekankan pentingnya pendidikan karakter, penguatan motivasi berprestasi yang sehat, serta transformasi pola pengasuhan dan lingkungan sosial yang lebih suportif terhadap integritas

Melalui pemahaman terhadap berbagai faktor tersebut, tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar: apakah perilaku korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang terinternalisasi atau merupakan konsekuensi dari kegagalan pendidikan dalam membangun karakter? Dengan mengkaji aspek internal, eksternal, budaya, serta motivasi berprestasi, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi terhadap pendekatan yang lebih holistik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yakni dengan penelitian kepustakaan atau studi literatur, dimana peneliti melakukan penelaahan literatur yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data. Menurut Nazir dalam Milya Sari menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan menelusuri dan memeriksa secara teliti buku, literatur, catatan, serta

berbagai laporan yang relevan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan (Sari, 2020). Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono dalam Nasution menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengkaji objek secara langsung dalam kondisi alami, di mana peneliti sendiri berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian (Nasution, 2015). Sehingga peneliti berfokus pada penganalisaan data yang bersumber dari telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian secara mendalam dan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Motivasi Perilaku Korupsi

Satu sifat kepribadian yang membuat orang mudah untuk berperilaku korupsi adalah motivasi berprestasi yang rendah (*low achievement motivation*) (Wahyudi, 2010). Konsep ini dikembangkan oleh tokoh psikologi yaitu David Mc Clelland yang digambarkan sebagai pendorong seseorang untuk terus meningkatkan prestasi kerjanya (Ridha, 2020). Individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi menginginkan suatu pekerjaan tugasnya dikerjakan dengan sebaik – baiknya dan tidak ingin hasil buah pekerjaannya asal jadi (Meinawati, 2007). Pekerjaan yang dihadapi di patok pada nilai standar dan kualitas yang tinggi. Dorongan kuat untuk menghasilkan akan mutu pekerjaan yang baik dan bukan salah satu type individu yang memiliki orientasi mendapatkan hasil yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Individu merasa tertantang dengan pekerjaan yang tergolong sulit. Individu menjadi tidak bergairah apabila pekerjaan dikerjakannya dengan setengah – setengah dan menghasilkan mutu rendah.

Kekayaan bukanlah menjadi tujuan individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi meskipun banyak juga diantaranya yang berhasil dan banyak menjadi kaya karena kualitas hasil pekerjaannya. Individu ini juga sangat tidak tertarik pada dengan perbuatan yang kurang sportif dalam mengumpulkan kekayaan, serta tidak terpikir untuk mencari cara praktis yang bertentangan dengan nilai moral misal seperti menipu, memanipulasi dll.

Orang Indonesia termasuk salah satu negara dengan yang memiliki kategori yang rendah dengan torehan angka 164 berdasarkan hasil pengukuran sekelompok mahasiswa. Hasil tersebut dapat memberikan informasi bagaimana kualitas pekerjaan yang dihasilkan di negara kita. Banyaknya individu yang bekerja dan menghasilkan pekerjaan seadanya dan terkesan asal jadi dan selesai (Citra et al., 2015). Hal ini dibuktikan dengan contoh banyaknya bangunan yang terbilang relatif baru sudah mengalami kerusakan bahkan ada yang sudah ambruk dan tidak bisa untuk dipakai kembali. Gambaran yang sangat jelas bahwa setiap

pekerjaan yang dihasilkan selalu berorientasi pada jumlah keuntungan yang diperoleh bukan berorientasi pada mutu dan kualitas yang dihasilkan.

Tidak hanya pada bangunan fisik dan infrastruktur yang menunjukkan bahwa motivasi berprestasinya rendah, namun pada lini performa kinerja seperti jual beli jabatan dan pengisian lowongan perjaan juga tidak luput dari hal tersebut. Banyaknya kinerja aparatur negara yang bekerja dan melayani masyarakat dengan baik apabila mendapatkan suatu imbalan tertentu selain pendapatan tetap yang didapatkan. Kalau tidak ada suatu imbalan tertentu terkesan mempersulit pelayanan agar bisa menggerakkan orang lain untuk memberikan imbalan. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah ketika adanya perencanaan sebuah proyek, agar tender tersebut bisa dikondisikan maka diberikan imbalan sebagai” pelicin”. Tanpa rasa ragu imbalan tersebut diambilkan dari dari dana proyek tersebut sehingga pada pelaksanaan dilapangan akan otomatis mengurangi mutu bahan baik secara kualitas mauun kuantitas.

Banyak pendapat para ahli yang mengemukakan bahwa pemberian imbalan atau pelicin ini banyak dikaitkan dengan kebiasaan para raja pada zaman dahulu pada saat menerima upeti dan seakan pola tersebut seperti terulang kepada para pejabat pengambil kebijakan pada masa ini. Pemberian imbalan “pelicin” ini dianggap sebagai suatu kebiasaan dan tidak ada yang salah apabila dilakukan, terlebih kepada para pejabat pengambil kebijakan dalam mengatur orang lain. Pesersi bahwa pemberian upeti diannggap seperti halnya pelicin maka akan lebih mempermudah dalam perilaku korupsi.

2. Korupsi : Faktor Budaya Atau Faktor Pendidikan

Peilaku korupsi tidak hanyak di dukung oleh faktor internal pelakunya saja akan tetapi perilaku ini juga didukung faktor Eksternal (faktor luar/ Lingngkungan) berikut akan dijelaskan mengenai faktor luar individu (Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, 2011). Korupsi merupakan tidak kejahatan atau kriminal seperti bentuk kejahatan yang lain. Pelaku korupsi ini tentunya dilakukan dengan penuh perhitungan dan perncanaan yang dilalui. Para ahli juga berpendapat menggunakan beberapa teori rasio dan analitisnya. Seperti yang dilakukan oleh John S Carrol yang mencoba dengan menggunakan rasio analitis bahwa suatu tindakan kriminal bahwa dapat dilakukan dan dipertimbangkan berdasarkan suatu formulasi dalam pengambilan keputusan (Hidayat et al., 2019). Adapun formulasi dijelaskan sebagai berikut:

$$SU = <(p(S) \times G) - (p(F) \times L)>$$

SU = Pertimbangan apakah perilaku kejahatan yang direncanakan akan dilaksanakan atau tidak.

p(S)= Pertimbangan potensi kejahatan akan berhasil dan sukses seperti yang direncanakan

G = Pertimbangan besar dan kecilnya keuntungan yang diperoleh dari tindak kejahatan

p(F) = Pertimbangan akan kegagalan dalam melakukan tindak kejahatan

L = **Pertimbangan** akan besar kecilnya kalau hukuman jika kejahatan itu gagal

Dengan formulasi tersebut diatas perilaku korupsi sangat mudah difahami apabila perolehan yang didapatkan dari tindak kejahatan lebih besar dari pada nilai kerugiannya. Pada sistem regulasi hukum yang dapat dikondisikan dengan mudah, dan sistem administrasi dan pengawasan kurang baik juga memudahkan pelaku kejahatan melakukan perilaku korupsi. banyak perilaku korupsi yang terdorong untuk melakukan karena hukuman yang akan di kenakan sudah dapat di tebak bahkan adanya keyakinan bahwa sanksi yang diberikan dapat pula di atur dan dikondisikan karena adanya oknum penegak hukum yang juga tergiur untuk menerima suap. Salah satu kesulitan yang sekarang dirasakan untuk penegakan hukuman bagi para koruptor adalah pengesahan rancangan undang – undang untuk perampasan aset para koruptor yang sudah memakan waktu kurang lebih delapan tahun lebih dan itupun tidak berbuah hasil yang menggembirakan (Khalila, 2023).

Faktor yang berikutnya yang ikut menyumbang perilaku korupsi adalah faktor budaya yang hidup hingga saat ini. Keberhasilan dan kegagalan dalam upaya pemberantasan korupsi akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakatnya. Ada beberapa budaya yang hingga kini yang memudahkan seseorang untuk melakukan perilaku korupsi yaitu budaya kekeluargaan, budaya bapakisme, dan budaya tidak berterus terang (*pakewuh*).

Budaya kekeluargaan yang dimiliki masyarakat negara kita sangatlah besar manfaatnya, namun juga dibalik kesemuanya ada sisi negatif yang ditimbulkan dari budaya tersebut salah satunya adalah budaya kekeluargaan akan menyulitkan seseorang bertindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Ketidak tegasan ini memicu orang untuk melakukan perilaku korupsi, karena peraturan yang dibuat masih bisa dibicarakan untuk bisa dikompromikan.

Budaya kedua yaitu bapakisme dimana persepsi yang terbangun dimasyarakat adalah seorang pemimpin butuh untuk diberikan pelayanan dan akses khusus yang tidak semua orang memilikinya terlebih aspek kepastian hukumnya. Budaya ini tanpa disadari bahwa pimpinan akan menjadi role model bagi bawahannya. Bawahan yang ada didalamnya akan mudah meniru. Sehingga perilaku korupsi seakan berjalan dengan lancar. Kondisi ini juga diperparah akan budaya masyarakat yang belum memiliki tingkat keterbukaan terhadap kritik, masyarakat tidak berani mengemukakan hal yang sesungguhnya terjadi karena adanya perasaan *pakewuh* (Sungkan) apabila melaporkan atasannya yang menyalahi aturan

SIMPULAN

Perilaku korupsi dalam perspektif psikologi tidak semata-mata muncul dari kelemahan moral individu, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal (seperti rendahnya motivasi berprestasi), faktor eksternal (lingkungan yang permisif dan minim kontrol), serta faktor budaya (budaya kekeluargaan, bapakisme, dan sikap tidak asertif). Kebiasaan sosial yang membiarkan praktik menyimpang dan sistem pendidikan yang gagal menanamkan nilai integritas memperkuat perilaku koruptif sebagai suatu kebiasaan yang diwariskan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi memerlukan pendekatan psikologi pendidikan yang menekankan pembentukan karakter, penguatan kontrol diri, dan rekonstruksi budaya sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. In *Elgar Encyclopedia of Cross-Cultural Management* (pp. 133–134). General Learning Press. <https://doi.org/10.4337/9781803928180.ch33>
- Citra, R., Dalam, P., & Televisi, I. (2015). *Kajian Teoritis Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan*. 1(2), 78–101.
- Hidayat, R., Ag, S., & Pd, M. (2019). *Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah*. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Khalila, A. (2023). *Rejuvenasi KPK: Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan Pendekatan In Rem dan Tinjauan Pendekatan Serupa pada Regulasi Unexplained Wealth di Australia*. LK2FHUI. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/>
- Meinawati, R. (2007). Peranan Motivasi Berprestasi Terhadap Prestasi Kerja Pada Agen Yang Bekerja di Kantor Operasional Pondok Gede dan Kalimalang AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Timur. *Jurnal Psikologi Vol*, 5(1), 1. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4980-ibusulis.pdf>
- Mustafa, H. (2004). Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Gynakologisch-Geburtshilfliche Rundschau*, 44(1), 25–30. <https://doi.org/10.1159/000074314>
- Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Y. K. (2011). *Anti-Korupsi Anti-Korupsi Pendidikan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Nasution, A. F. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). CV Harfa Creative. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-e-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Ridha, M. (2020). Teori Motivasi McClelland dan Implikasinya dalam Pembelajaran PAI. *Palapa*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.36088/palapa.v8i1.673>

- Sari, M. (2020). NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 41–53.
- Wahyudi. (2010). Memahami Motivasi Berprestasi Siswa Oleh Wahyudi (IP, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak). *Psikologi Pendidikan*. <http://dx.doi.org/10.26418/gm.v25i3.210>
- Widiastuti, T. W. (2009). Korupsi dan Upaya Pemberantasannya. *Wacana Hukum*, 8(2), 107–118.